



### **Kepemimpinan Rohani dan Akuntabilitas Moral: Sebuah Respons Teologis-Biblika terhadap Fenomena Korupsi di Indonesia**

**Setio Dharma Kusuma<sup>1</sup>, Onesiporus Pengharapan Lase<sup>2</sup>**

<sup>1-2</sup>Sekolah Tinggi Teologi Tabernakel Indonesia, Surabaya

onesiporus.lase@staff.sttia.ac.id

#### **Abstract**

*The corruption crisis that afflicts Indonesian society is not merely a legal or governmental issue, but also reflects a profound spiritual crisis. This article examines the integration between spiritual leadership and moral accountability as a biblical response to the phenomenon of corruption. Employing a qualitative approach through theological literature study, the research interprets 1 Samuel 2:12–36 to trace the roots of leadership failure in the sons of Eli as an example of moral deviation and the loss of spiritual responsibility. The findings indicate that corruption arises from the disintegration between faith and morality, as well as the misuse of authority that ought to be oriented toward service. This study reveals that genuine spiritual leadership, rooted in the fear of the Lord and biblical integrity, stands as the antithesis of corrupt practices. The implications highlight the central role of the church and Christian educational institutions in shaping accountable leadership through character formation and transformative spirituality.*

*Keywords: Spiritual leadership, moral accountability, corruption, biblical theology, Christian education*

#### **Abstrak**

Krisis korupsi yang melanda masyarakat Indonesia tidak hanya menjadi persoalan hukum dan sistem pemerintahan, melainkan juga menunjukkan krisis spiritual yang mendalam. Artikel ini mengkaji integrasi antara kepemimpinan rohani dan akuntabilitas moral sebagai respons biblika terhadap fenomena korupsi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka teologis, penelitian ini menafsirkan teks 1 Samuel 2:12–36 untuk menelusuri akar kegagalan kepemimpinan anak-anak Imam Eli sebagai contoh penyimpangan moral dan kehilangan tanggung jawab rohani. Temuan penelitian menunjukkan bahwa korupsi bersumber dari disintegrasi antara iman dan moralitas, serta penyalahgunaan otoritas yang seharusnya berorientasi pelayanan. Studi ini mengungkapkan bahwa kepemimpinan rohani yang sejati, yang berakar pada takut akan Tuhan dan integritas biblika, merupakan antitesis dari praktik korupsi. Implikasi dari penelitian ini menekankan peran sentral gereja dan lembaga pendidikan Kristen dalam membentuk kepemimpinan yang akuntabel melalui pendidikan karakter dan spiritualitas yang transformatif.

Kata kunci: Kepemimpinan rohani, akuntabilitas moral, korupsi, teologi biblika, pendidikan Kristen

## Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu tantangan paling serius dalam kehidupan sosial, politik, dan religius masyarakat modern. Data terbaru menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah struktural yang serius di Indonesia. Berdasarkan laporan Transparency International melalui *Corruption Perceptions Index (CPI) 2024*, Indonesia memperoleh skor 37 dan menempati peringkat ke-99 dari 180 negara, menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap integritas sektor pemerintahan masih rendah (International 2024, n. Diakses: Selasa, 21 Oktober 2025). Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 364 kasus korupsi dengan 888 tersangka dan estimasi kerugian negara mencapai Rp279,9 triliun (Watch 2024, n. Diakses: Selasa, 21 Oktober 2025). Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangani lebih dari 2.700 perkara antara tahun 2020–2024 dan menetapkan 691 tersangka, sedangkan Mahkamah Agung melaporkan lebih dari 1.600 putusan perkara korupsi pada tahun 2024 (Infopublik 2024, n. Diakses: Selasa, 21 Oktober 2025).

Fenomena ini tidak hanya mengancam integritas bangsa, tetapi juga mengguncang kredibilitas lembaga keagamaan, termasuk gereja dan institusi pendidikan Kristen. Ironisnya, dalam masyarakat yang religius seperti Indonesia, praktik korupsi tetap meluas, sehingga menimbulkan refleksi kritis mengenai peran dan tantangan nilai-nilai iman dalam membentuk integritas pribadi dan kelembagaan (Rope, Sujatmoko, and Carlos 2023, 1–3). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan iman dan praksis etis dalam kehidupan kepemimpinan, di mana nilai-nilai religius berhenti pada tataran simbolik dan ritual, tanpa terinternalisasi secara konsisten dalam pengambilan keputusan moral dan penggunaan otoritas publik (Gule 2022). Akibatnya, iman tidak lagi berfungsi sebagai sumber orientasi etis yang membentuk tanggung jawab moral pemimpin, melainkan sekadar identitas personal yang terpisah dari praktik kepemimpinan sehari-hari. Fakta-fakta ini menegaskan bahwa korupsi bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga krisis moral dan spiritual yang menuntut tanggapan serius dari seluruh elemen masyarakat, termasuk gereja. Dalam konteks ini, kepemimpinan rohani Kristen yang dalam kajian teologi kepemimpinan dipahami sebagai praktik kepemimpinan yang berakar pada pelayanan, integritas moral, dan kesadaran akan pertanggungjawaban di hadapan Allah (Blackaby and Blackaby 2011), tidak semata-mata berbicara tentang otoritas spiritual, melainkan juga tentang tanggung jawab moral dan keteladanan etis yang mencerminkan karakter Kristus di tengah tantangan budaya koruptif.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Maulidi menegaskan bahwa religiusitas tanpa integritas tidak cukup untuk menekan perilaku korupsi; faktor-faktor seperti budaya organisasi dan jarak kekuasaan justru dapat memperlemah nilai-nilai etis ketika tidak diimbangi dengan akuntabilitas moral yang kuat (Maulidi et al. 2024). Sementara itu, penelitian di lingkungan pendidikan teologi oleh (Vivian, Nugroho, and Jonathans 2024), menunjukkan bahwa kepemimpinan rohani kerap menghadapi krisis moral dan spiritual, yang berdampak pada menurunnya kepercayaan jemaat dan kualitas pendidikan iman.

Kajian-kajian teologis dan etis di Indonesia telah berupaya menjawab isu tersebut

dari berbagai sudut pandang. (Djajadi 2023) menyoroti bahwa pembentukan karakter anti-korupsi harus berakar pada etika teologi yang menegaskan korupsi sebagai dosa struktural dan moral yang mengkhianati nilai keadilan Allah. Dalam ranah pendidikan agama Kristen, (Nggebu 2021) menunjukkan bahwa pendidikan etika yang berorientasi pada nilai-nilai Alkitab memiliki potensi besar dalam membentuk kesadaran moral yang menolak korupsi. Selain itu, artikel internasional seperti *Relevance of Christian Ethics in Addressing Corruption and Social Justice Issues in Indonesia* menegaskan bahwa etika Kristen memiliki relevansi mendalam dalam mengatasi ketidakadilan sosial dan perilaku koruptif di konteks negara berkembang (Arifianto, Sumual, and Rahayu 2025).

Beberapa penelitian lain juga mengaitkan kepemimpinan rohani dengan nilai moralitas dan tanggung jawab sosial, seperti kajian tentang pembentukan pemimpin Kristen berintegritas, (Rini, Arifianto, and Anjaya 2024) serta analisis pendidikan karakter dalam kepemimpinan berbasis kearifan lokal (Kia et al. 2025, 37–39). Namun demikian, sebagian penelitian tersebut cenderung menyoroti aspek-aspek tertentu secara terpisah, seperti etika anti-korupsi atau moralitas kepemimpinan, sehingga relasi antara dimensi teologi biblikal, pendidikan iman, dan akuntabilitas moral belum dibahas secara terpadu, padahal ketiganya saling berkaitan dalam membentuk orientasi etis kepemimpinan.

Keterbatasan penelitian sebelumnya menunjukkan adanya kesenjangan ilmiah yang penting untuk dijawab, yaitu kurangnya kajian teoretis dan konseptual yang mengaitkan kepemimpinan rohani Kristen dengan akuntabilitas moral sebagai respons biblikal terhadap budaya korupsi di Indonesia. Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada tataran deskriptif atau normatif, tanpa menawarkan kerangka konseptual yang dapat diterapkan secara praktis dalam pembinaan kepemimpinan gereja dan pendidikan agama Kristen. Sejumlah pemikir etika dan kepemimpinan Kristen menegaskan bahwa kepemimpinan yang berakar pada iman menuntut integrasi antara dimensi spiritual, moral, dan struktural dari tanggung jawab kepemimpinan (Banks and Ledbetter 2004; Kretzschmar 2023). Padahal, dalam konteks sosial Indonesia yang sarat dengan praktik patronase, loyalitas personal, dan hierarki kekuasaan yang tinggi, akuntabilitas moral menjadi komponen yang sangat krusial bagi pemimpin rohani agar dapat menjalankan perannya secara etis, transparan, dan berorientasi pada pelayanan yang berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan teologis yang tidak hanya menyoroti aspek etika individual, tetapi juga dimensi struktural dan spiritual dari tanggung jawab kepemimpinan Kristen.

Berdasarkan celah penelitian yang teridentifikasi, artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana integrasi antara kepemimpinan rohani dan akuntabilitas moral dalam perspektif teologi biblikal dapat menjadi kerangka reflektif normatif dalam merespons budaya korupsi di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada upaya memahami prinsip-prinsip kepemimpinan yang berakar pada kesalehan, rasa takut akan Tuhan, serta orientasi pelayanan sebagai landasan pembentukan karakter pemimpin yang berintegritas, dengan pendidikan iman Kristen dipahami sebagai implikasi pembinaan, bukan sebagai variabel utama penelitian. Melalui analisis terhadap dinamika relasional antara iman dan etika

dalam praksis kepemimpinan, artikel ini menegaskan bahwa upaya menghadapi korupsi tidak dapat dilepaskan dari dimensi spiritual dan moral kepemimpinan, di samping reformasi struktural dan mekanisme pengawasan yang bersifat institusional.

Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi substantif terhadap pengembangan teologi praktis dengan menawarkan kerangka konseptual tentang kepemimpinan rohani yang berorientasi pada akuntabilitas moral dalam menghadapi realitas korupsi modern. Kajian ini mengintegrasikan pendekatan biblika dan etika Kristen untuk menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran pemimpin rohani sebagai teladan moral dan agen transformasi sosial, dengan pedagogi iman dan pendidikan agama Kristen diposisikan sebagai ranah implikasi praksis dari kerangka yang dibangun. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya diskursus akademik mengenai relasi antara iman dan integritas dalam kepemimpinan Kristen; secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi gereja, lembaga teologi, dan institusi pendidikan Kristen dalam membangun pembinaan kepemimpinan yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan konseptual bagi teologi praktis sekaligus menawarkan refleksi biblika yang relevan terhadap tantangan moral dan spiritual masyarakat kontemporer yang diwarnai oleh korupsi dan krisis integritas.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) (Danandjaja 2014, 3–4). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah teks Alkitab, khususnya 1 Samuel 2:12–36, yang digunakan sebagai sumber normatif-teologis utama dalam menafsirkan prinsip kepemimpinan rohani dan akuntabilitas moral melalui pendekatan hermeneutika teologis. Teks ini dipilih karena secara eksplisit menggambarkan penyalahgunaan otoritas keagamaan, kegagalan akuntabilitas moral, dan dampaknya terhadap komunitas umat, sehingga relevan dengan tema kepemimpinan dan korupsi.

Sementara itu, sumber data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku-buku teologi dan etika Kristen, serta publikasi dari lembaga resmi seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang digunakan bukan sebagai data empiris utama, melainkan sebagai konteks dialogis untuk memperkaya refleksi teologis dan analisis etis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menafsirkan teks-teks teologis dan hasil penelitian terdahulu secara kritis untuk menemukan konsep normatif yang relevan dengan permasalahan kontemporer (Creswell and Creswell 2017, 42).

Tahapan penelitian dilakukan melalui beberapa langkah sistematis, yaitu: (1) mengumpulkan dan menelaah literatur teologis dan etika Kristen yang relevan; (2) melakukan eksposisi dan interpretasi terhadap teks 1 Samuel 2:12–36 dengan pendekatan hermeneutika historis-teologis reflektif, untuk mengidentifikasi pesan teologis utama terkait karakter kepemimpinan dan penyimpangan moral; (3) melakukan analisis tematik (*thematic analysis*) terhadap konsep kepemimpinan rohani dan akuntabilitas moral dalam sumber-sumber sekunder; (4) menyintesis temuan biblika dengan kerangka teologis

dan realitas korupsi dalam konteks masyarakat Indonesia; dan (5) merumuskan kesimpulan serta implikasi praktis bagi kepemimpinan Kristen masa kini.

Teks 1 Samuel 2:12-36 dipilih karena secara eksplisit menggambarkan penyalahgunaan otoritas keagamaan, kegagalan akuntabilitas moral, dan dampaknya terhadap komunitas umat, sehingga relevan dengan tema kepemimpinan dan korupsi. Pemilihan teks 1 Samuel 2:12-36 didasarkan pada kriteria tematik dan naratifnya yang unggul (*selection criteria*) dalam mengilustrasikan ‘korupsi spiritual’—yaitu penyimpangan moral yang berakar pada hilangnya rasa takut akan Tuhan (ay. 12) oleh para pemegang otoritas religius. Narasi kegagalan putra-putra Imam Eli serta konsekuensi ilahiah yang menyertainya (ay. 27-36) menawarkan pola teologis yang jelas tentang hubungan kausal antara kepemimpinan yang tidak akuntabel dan kehancuran institusional. Meskipun Alkitab mencatat banyak contoh kegagalan kepemimpinan (misalnya, Bileam, Yudas Iskariot, atau figur-figur tertentu dalam kitab Hakim-Hakim), kisah Hofni dan Pinehas dipilih karena kompleksitasnya yang menggabungkan dimensi penyalahgunaan kepercayaan publik, korupsi ritual, dan kegagalan pengawasan generasi (dari Eli), sehingga memberikan analogi yang kaya dan multidimensi untuk dikontekstualisasikan dengan fenomena korupsi modern.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan hermeneutika teologis dengan menekankan relasi antara teks, konteks, dan realitas sosial sebagaimana dikembangkan dalam model interpretatif Paul Ricoeur (Ricoeur 1976, 87–88). Dengan demikian, metode penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif-kritis, yang bertujuan menghubungkan prinsip-prinsip teologis dengan tantangan etika publik dan praksis kepemimpinan Kristen dalam menghadapi budaya korupsi.

## Hasil dan Pembahasan

### *Hakikat Kepemimpinan Rohani dalam Perspektif Teologi Kristen*

Kepemimpinan rohani dalam teologi Kristen berakar pada panggilan ilahi untuk melayani, bukan sekadar memerintah. Dalam perspektif Alkitab, kepemimpinan bukanlah posisi otoritas hierarkis melainkan sebuah tanggung jawab moral dan spiritual untuk menuntun umat Allah menuju ketaatan kepada kehendak-Nya. Yesus Kristus sendiri menegaskan hakikat kepemimpinan yang melayani dalam Markus 10:42–45, ketika Ia menolak model kepemimpinan duniawi yang menindas dan menggantikannya dengan model pelayanan penuh kasih. Pola kepemimpinan ini menegaskan bahwa pemimpin sejati bukan yang dilayani, melainkan yang melayani dengan kerendahan hati. Blackaby menekankan bahwa “kepemimpinan rohani terjadi ketika seseorang memengaruhi orang lain untuk bergerak mengikuti kehendak Allah,” menegaskan bahwa dimensi spiritual menjadi inti kepemimpinan Kristen, bukan sekadar kemampuan administratif atau karisma personal. (Blackaby and Blackaby 2011, 18–19)

Dalam tradisi teologi Kristen, kepemimpinan rohani juga dipahami sebagai partisipasi dalam *missio Dei*, yakni keterlibatan pemimpin dalam karya Allah di dunia. Pemahaman ini menegaskan bahwa kepemimpinan rohani tidak terbatas pada pengelolaan

internal gereja, tetapi berfungsi sebagai kerangka normatif yang membentuk orientasi etis pemimpin. Sebagai kerangka normatif, *missio Dei* menetapkan standar atau 'norma' bagi kepemimpinan, seperti: (1) orientasi pada pelayanan dan keselamatan (*diakonia* dan *soteria*), bukan pada kekuasaan; (2) tanggung jawab sebagai pengelola (*oikonomos*) yang setia atas amanah Allah (1 Kor. 4:1-2); dan (3) panggilan untuk mewujudkan nilai-nilai Kerajaan Allah—keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan (Mat. 23:23)—dalam konteks sosial yang lebih luas. (Fry and Cohen 2009, 695–697) dalam teorinya tentang *spiritual leadership* menjelaskan bahwa kepemimpinan yang berlandaskan spiritualitas menumbuhkan visi transendental, harapan, dan cinta altruistik yang memotivasi individu untuk melayani dengan makna dan tujuan yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan 1 Petrus 5:2–3 yang tidak secara eksplisit menggunakan istilah *kepemimpinan*, melainkan menekankan peran *gembala* (*poimēn*) dalam menggembalakan umat Allah. Dalam teks ini, penggembalaan dipahami bukan sebagai bentuk penguasaan otoritas, melainkan sebagai pelayanan yang dijalankan dengan kerelaan hati, keteladanan hidup, dan tanggung jawab moral. Melalui refleksi teologis ini, konsep penggembalaan dapat dipahami sebagai fondasi normatif bagi kepemimpinan Kristen, di mana praktik memimpin berakar pada etos pelayanan pastoral, bukan dominasi struktural. Dengan demikian, kepemimpinan rohani Kristen tidak dimaknai sebagai kekuasaan, tetapi sebagai panggilan untuk melayani, meneladani, dan memampukan komunitas iman dalam ketaatan kepada Allah

Lebih lanjut, karakteristik utama dari kepemimpinan rohani dapat dipahami dari integrasi antara visi spiritual, keteladanan moral, dan disiplin rohani. Maxwell menguraikan bahwa kepemimpinan sejati selalu dimulai dari pengendalian diri dan keutuhan batin (*inner integrity*), karena tanpa moralitas internal, otoritas eksternal akan kehilangan makna. Pemimpin rohani harus terlebih dahulu dipimpin oleh Allah sebelum memimpin orang lain (Maxwell 2018, 34–35). Prinsip ini diperkuat oleh (Osmer 2008, 12–15) menegaskan bahwa refleksi teologis dalam kepemimpinan gerejawi menuntut pemimpin untuk membaca tanda-tanda zaman dan menafsirkan realitas sosial dengan kebijaksanaan iman (*spiritual discernment*). Oleh sebab itu, kepemimpinan rohani tidak hanya berbicara tentang strategi, melainkan tentang karakter yang dibentuk melalui relasi intim dengan Allah, doa, dan pembacaan firman.

Namun demikian, krisis kepemimpinan rohani di banyak lembaga keagamaan dewasa ini menunjukkan pergeseran paradigma dari pelayanan menuju pencarian kekuasaan dan status. Hal ini mencerminkan kemunduran spiritualitas kepemimpinan, di mana orientasi pelayanan berubah menjadi orientasi keuntungan pribadi. Nouwen dalam bukunya *In the Name of Jesus* menegaskan bahwa godaan terbesar bagi pemimpin Kristen adalah keinginan untuk menjadi relevan, berkuasa, dan populer, padahal Kristus memanggil pemimpin untuk menjadi hamba yang taat dan setia, bukan selebritas rohani (Nouwen 1999, 63–65). Perspektif ini menjadi koreksi profetis terhadap pola kepemimpinan modern yang sering kali mengabaikan dimensi moral dan rohani demi efektivitas organisasi.

Dari sisi teologis, kepemimpinan rohani menuntut pembentukan diri melalui disiplin spiritual yang berkelanjutan. Paulus mengajarkan kepada Timotius agar seorang pemimpin harus memiliki kesetiaan, ketenangan, dan kemampuan mengajar (1 Timotius 3:1–7), yang menunjukkan keseimbangan antara integritas moral dan kapasitas pastoral. Dengan demikian, kepemimpinan rohani Kristen bersifat holistik: melibatkan dimensi intelektual, spiritual, dan etis secara terpadu. Fry dan Cohen menyebut integrasi ini sebagai *spiritual leadership for sustainability*, yaitu kepemimpinan yang menghasilkan ketahanan moral dan kesetiaan jangka panjang melalui nilai-nilai kasih, harapan, dan iman (Fry and Cohen 2009).

Secara konseptual, kepemimpinan rohani dapat dipandang sebagai model transformasional yang beroperasi dalam ranah etika publik. Dalam kerangka ini, kepemimpinan rohani tidak berhenti pada pembinaan internal komunitas iman, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang menuntut kehadiran nilai-nilai Kerajaan Allah di tengah realitas masyarakat modern yang ditandai oleh praktik korupsi dan krisis integritas. Dalam konteks tersebut, Bonhoeffer menegaskan bahwa kepemimpinan Kristen sejati menuntut keberanian untuk memikul tanggung jawab etis di tengah dunia yang rusak, karena iman yang tidak diwujudkan dalam tindakan moral kehilangan daya kesaksiannya (Bonhoeffer 2012, 132–34). Dengan demikian, kepemimpinan rohani dipahami sebagai bentuk kesaksian iman yang hidup, di mana integrasi antara kasih, kebenaran, dan keadilan menjadi dasar praksis kepemimpinan dalam ruang pelayanan maupun kehidupan publik.

### ***Akuntabilitas Moral sebagai Prinsip Etika Kristen***

Akuntabilitas moral merupakan salah satu fondasi utama dalam etika Kristen yang menegaskan tanggung jawab manusia sebagai ciptaan Allah untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan. Dalam perspektif biblikal, akuntabilitas moral bukan hanya bentuk kepatuhan terhadap norma eksternal, tetapi refleksi iman yang diwujudkan dalam tanggung jawab kepada Allah, sesama, dan diri sendiri (Evans 2021, 316–323). Roma 14:12 menegaskan bahwa setiap orang akan memberi pertanggungjawaban kepada Allah, yang menempatkan akuntabilitas sebagai prinsip teologis mendasar dalam relasi perjanjian antara Allah dan manusia beriman. Dalam kerangka ini, setiap tindakan pemimpin Kristen tidak dapat dilepaskan dari kesadaran akan pertanggungjawaban ilahi, sehingga kepemimpinan dipahami sebagai praktik moral yang lahir dari relasi iman yang hidup. Akuntabilitas moral dengan demikian menjadi landasan etis yang membentuk kesetiaan, ketulusan, dan kejujuran dalam menjalankan panggilan pelayanan, khususnya di tengah konteks sosial yang rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam kerangka teologi Kristen, akuntabilitas moral dibangun dari pemahaman bahwa manusia, khususnya pemimpin, hidup dalam relasi perjanjian dengan Allah yang menuntut pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan penggunaan otoritas. Akuntabilitas moral tidak pertama-tama dipahami sebagai mekanisme administratif atau kontrol eksternal, melainkan sebagai kesadaran teologis bahwa seluruh tindakan manusia berlangsung di hadapan Allah yang kudus (Kretzschmar 2023). Kesadaran ini berakar pada

pengakuan bahwa otoritas kepemimpinan bersifat derivatif diterima sebagai amanah dan karena itu tidak dapat dijalankan secara otonom atau sewenang-wenang. Dalam perspektif ini, akuntabilitas moral terbentuk melalui integrasi antara iman, hati nurani, dan tanggung jawab etis, sehingga pemimpin dipanggil untuk mempertanggungjawabkan bukan hanya hasil tindakannya, tetapi juga motivasi dan orientasi moral yang melatarbelakanginya. Penelitian (Adejuwon 2023) menegaskan bahwa pemimpin Kristen yang memiliki kesadaran akan *divine accountability* menunjukkan perilaku etis yang lebih konsisten, karena mereka memahami bahwa semua tindakan akan diperiksa dalam terang kekudusan Allah. Artinya, kesadaran transendental terhadap Allah menjadi dasar bagi pembentukan moralitas yang berkelanjutan dalam kepemimpinan Kristen.

Berdasarkan kerangka tersebut, akuntabilitas moral dalam kepemimpinan Kristen dapat didefinisikan sebagai kesadaran teologis dan etis seorang pemimpin untuk mempertanggungjawabkan seluruh tindakan, keputusan, dan penggunaan otoritasnya di hadapan Allah, sesama manusia, dan komunitas iman (Asamoah-Gyadu 2022, 110–113). Akuntabilitas moral mencakup dimensi internal yakni pembentukan hati nurani yang takut akan Tuhan serta dimensi eksternal berupa keterbukaan terhadap penilaian etis dan koreksi komunitas. Dengan demikian, akuntabilitas moral bukan sekadar kepatuhan terhadap aturan, tetapi komitmen iman yang menuntut konsistensi antara pengakuan iman dan praksis kepemimpinan dalam ruang publik.

Penerapan akuntabilitas moral menuntut adanya sistem dan budaya kepemimpinan yang transparan serta terbuka terhadap evaluasi. Studi terbaru oleh (Clawson, J. G., & Emmons 2021, 66–68) menunjukkan bahwa pemimpin yang menanamkan budaya akuntabilitas berbasis iman dalam organisasi Kristen dapat mengurangi kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga. Dalam konteks pendidikan agama Kristen dan pelayanan gerejawi, transparansi etis ini menjadi bukti nyata bahwa kepemimpinan rohani tidak hanya berbicara tentang karisma spiritual, melainkan juga kemampuan untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan secara moral dan teologis. Model akuntabilitas demikian menciptakan sinergi antara spiritualitas dan etika publik, di mana pemimpin Kristen menjadi teladan hidup yang menghidupi nilai keadilan, kasih, dan kejujuran sebagaimana diamanatkan dalam Mikha 6:8.

Dengan demikian, akuntabilitas moral bukanlah konsep sekuler yang diadopsi ke dalam gereja, tetapi prinsip teologis yang bersumber dari hakikat manusia sebagai gambar Allah (*imago Dei*). Ia menuntut pertanggungjawaban tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah yang kudus (Erickson 2018, 537–540). Ketika kepemimpinan dipahami sebagai amanah ilahi, pemimpin tidak lagi memandang otoritas sebagai hak personal, melainkan sebagai tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kesadaran akan pertanggungjawaban ilahi ini membentuk kontrol moral dari dalam diri pemimpin, yang mendahului dan melampaui pengawasan eksternal. Dalam konteks inilah akuntabilitas moral memiliki relevansi langsung terhadap praktik korupsi: korupsi muncul ketika otoritas dilepaskan dari kesadaran pertanggungjawaban, sedangkan akuntabilitas

moral memulihkan relasi antara kuasa, tanggung jawab, dan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, akuntabilitas moral bukan sekadar nilai normatif, melainkan prinsip teologis yang secara inheren menolak logika korupsi sebagai penyalahgunaan amanah.

### ***Korupsi sebagai Krisis Akuntabilitas Moral***

Korupsi telah menjadi fenomena sosial yang memprihatinkan di Indonesia, bukan hanya karena dampaknya terhadap pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahan, tetapi juga karena melemahkan integritas publik dan kepercayaan sosial. Akar dari tindakan korupsi tidak semata-mata terletak pada lemahnya sistem hukum atau pengawasan birokrasi, melainkan juga pada krisis integritas moral individu yang menjalankan otoritas di dalam sistem tersebut. Dalam perspektif teologi biblikal, otoritas dipahami sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Christopher J.H. Wright menegaskan bahwa *“the abuse of power is a denial of the very character of God, whose authority is exercised in justice and covenant faithfulness”* (Wright 2004, 263). Dengan demikian, korupsi bukan hanya kegagalan administratif, tetapi penyimpangan teologis dari hakikat kepemimpinan sebagai penatalayanan ilahi. Narasi 1 Samuel 2 memperlihatkan bahwa kerusakan terjadi bukan karena ketiadaan struktur keimaman, melainkan karena para imam “tidak mengenal TUHAN” (1 Sam. 2:12), sehingga otoritas yang dipercayakan kepada mereka berubah menjadi sarana eksploitasi. Oleh sebab itu, reformasi sistem tanpa pembaruan karakter dan kesadaran akan akuntabilitas ilahi berisiko menghasilkan pengulangan penyalahgunaan kuasa dalam bentuk yang berbeda.

Dalam perspektif teologis Kristen, korupsi dipandang sebagai sebuah pengkhianatan terhadap hakikat manusia sebagai *imago Dei*, karena manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah dipanggil untuk mencerminkan kejujuran, keadilan, dan kasih dalam setiap aspek kehidupan; praktik korupsi justru menunjukkan kegagalan moral dalam menegakkan nilai-nilai tersebut dan bertentangan dengan kehendak Allah yang menghendaki integritas dan keadilan dalam kehidupan umat manusia (Elia 2023; Lase and Parinussa 2025; Nggebu 2021). ketika manusia menyalahgunakan kepercayaan dan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, ia secara fundamental menolak persekutuan dengan Allah dan sesama, dan akibatnya merusak tatanan sosial yang dikehendaki Tuhan (bnd. Amos 5:12; Mikha 6:8).

Dalam konteks ini, korupsi dapat dilihat sebagai krisis akuntabilitas moral yang menandakan hilangnya kesadaran akan tanggung jawab manusia di hadapan Allah. Akuntabilitas bukan sekadar tanggung jawab administratif terhadap lembaga, tetapi sebuah kesadaran eksistensial bahwa setiap tindakan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta, serta merupakan amanah ilahi yang menuntut pertanggungjawaban moral dan spiritual (Kretzschmar 2023, 3–4). Dalam konteks Indonesia, praktik korupsi di sektor publik sering dikaitkan dengan kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, ketimbang semata-mata sebagai sarana pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat (Elia 2023; Nggebu 2021, 30). Fenomena ini menunjukkan bahwa akar

masalah korupsi tidak hanya bersifat hukum dan sosial, tetapi juga terkait dengan dimensi moral dan spiritual, yang menjadi fondasi penting bagi integritas pejabat publik.

Pembentukan akuntabilitas publik yang sejati tidak mungkin terwujud tanpa transformasi moral yang berakar pada iman. Pendidikan iman dan pembentukan karakter dalam konteks masyarakat Kristen harus menanamkan kesadaran tanggung jawab ganda kepada sesama dan kepada Allah (Gule 2022; Lase 2025). Dengan demikian, akuntabilitas menempatkan manusia bukan hanya sebagai warga negara yang tunduk pada hukum, tetapi juga sebagai hamba Allah yang setia terhadap nilai-nilai kerajaan-Nya. Dalam terang ini, persoalan korupsi harus ditangani melalui pendekatan yang integratif: pembaruan moral, spiritual, dan sosial yang berakar pada nilai-nilai Kristiani tentang kejujuran dan tanggung jawab.

Krisis akuntabilitas moral di Indonesia juga memperlihatkan adanya jurang antara pendidikan nilai dan penerapan praktisnya dalam kehidupan publik. Banyak program pendidikan antikorupsi yang digalakkan oleh lembaga negara gagal mengubah perilaku karena tidak menyentuh dimensi hati nurani dan spiritualitas. Pembentukan integritas sejati hanya dapat terjadi melalui transformasi batiniah yang lahir dari kesadaran akan hadirat Allah. Karena korupsi adalah hasil dari “*spiritual vacuum*,” kehampaan rohani yang membuat individu kehilangan arah moral, sehingga tindakan salah tidak lagi menimbulkan rasa bersalah (Roshady and Wibowo 2024). Dalam perspektif ini, pemulihan bangsa dari budaya korupsi harus dimulai dari pembaruan rohani: sebuah pertobatan nasional yang menempatkan kembali nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan sebagai pusat kehidupan sosial. Sejumlah penelitian tentang pendidikan anti-korupsi menegaskan bahwa transfer pengetahuan dan kampanye nilai cenderung tidak berkelanjutan bila tidak disertai formasi karakter, keteladanan, dan budaya organisasi yang konsisten (Maulidi et al. 2024; Nggebu 2021).

Selain itu, refleksi atas kisah anak-anak Imam Eli (1 Samuel 2:12–36) memberikan pelajaran teologis yang mendalam tentang tanggung jawab kepemimpinan dan konsekuensi dari penyalahgunaan kuasa. Anak-anak Eli digambarkan sebagai imam yang tidak menghormati Tuhan dan memperlakukakan jabatan suci demi kepentingan pribadi. Kisah ini bukan hanya peringatan bagi pemimpin rohani, tetapi juga bagi setiap pemegang otoritas publik. Ketika tanggung jawab spiritual digantikan oleh keserakahan, dan panggilan pelayanan diubah menjadi alat pemuas diri, maka kehancuran moral tidak dapat dihindarkan. Dalam konteks modern, narasi ini menegaskan bahwa kegagalan akuntabilitas bukanlah isu birokratis, melainkan akibat langsung dari hati yang tidak tunduk kepada Allah. Seperti halnya Eli yang gagal menegakkan disiplin moral terhadap anak-anaknya, sistem sosial yang menoleransi korupsi tanpa keadilan sejati akan menanggung akibat kehancurannya sendiri. Penulis menyadari bahwa konteks Israel kuno menampilkan irisan antara otoritas religius, sosial, dan politis; sementara Indonesia modern mengenal diferensiasi institusi. Oleh karena itu, kisah Eli dipakai secara analogis untuk membaca pola penyalahgunaan mandat dan kegagalan pengawasan moral, bukan untuk menyamakan struktur institusionalnya secara langsung (Niebuhr 2013).

Peran gereja dan pendidikan Kristen dalam konteks ini menjadi sangat penting. Gereja dipanggil untuk tidak hanya mengutuk korupsi secara verbal, tetapi menjadi agen transformasi moral yang aktif melalui teladan kepemimpinan yang berintegritas. Pendidikan Kristen perlu diarahkan untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral dan spiritual. Kepemimpinan Kristen yang autentik lahir dari spiritualitas pelayanan di mana pemimpin memandang kekuasaan sebagai amanah, bukan hak (Mzondi 2023). Dalam konteks Indonesia, semangat ini harus dihidupkan kembali melalui model kepemimpinan yang rendah hati, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga gereja dan masyarakat dapat bersama-sama menolak budaya korupsi yang sudah mengakar. Pernyataan ini tidak dimaksudkan menggeneralisasi bahwa semua pemimpin rohani gagal memberi teladan; dalam banyak konteks terdapat praktik-praktik kepemimpinan yang setia. Namun, artikel ini menekankan perlunya mekanisme akuntabilitas dan keteladanan yang terlembaga agar kesaksian etis gereja dapat berdampak lebih luas. Secara praktis, hal ini dapat ditempuh melalui transparansi dan audit keuangan, penyusunan kode etik dan mekanisme pelaporan, pembinaan karakter melalui mentoring dan disiplin rohani, serta pendidikan antikorupsi berbasis studi kasus dan pembelajaran pengalaman (Banks and Ledbetter 2004; Clawson, J. G., & Emmons 2021).

Berdasarkan uraian di atas, korupsi harus dipahami sebagai fenomena multidimensional yang menuntut respons teologis yang komprehensif. Kepemimpinan rohani yang berintegritas tidak hanya menjadi teladan moral, tetapi juga kekuatan profetis yang menegur ketidakadilan dan mengajak masyarakat kepada pertobatan sosial. Melalui nilai-nilai iman seperti kejujuran, tanggung jawab, dan pelayanan, teologi Kristen dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan moral bangsa. Ketika pemimpin rohani meneladani Kristus yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani (Markus 10:45) maka nilai-nilai integritas dan akuntabilitas akan menjelma menjadi budaya sosial yang menolak segala bentuk korupsi. Oleh sebab itu, refleksi teologis tentang korupsi bukan sekadar wacana moral, melainkan panggilan bagi gereja dan umat Kristen untuk mempraktikkan iman yang berdampak dalam kehidupan publik. Dalam kerangka ini, istilah “multidimensional” menunjuk pada kenyataan bahwa korupsi bekerja sekaligus pada lapisan legal-institusional (aturan dan penegakan), kultural (norma dan kebiasaan), ekonomi (insentif dan akses sumber daya), serta moral-spiritual (orientasi hati dan hati nurani). Oleh karena itu, respons teologis yang komprehensif tidak meniadakan pendekatan struktural, tetapi melengkapinya melalui pembentukan karakter dan praksis akuntabilitas (Maulidi et al. 2024; Watch 2024).

### ***Integrasi Kepemimpinan Rohani dan Akuntabilitas Moral sebagai Respons terhadap Korupsi***

Integrasi antara kepemimpinan rohani dan akuntabilitas moral merupakan respons teologis yang mendasar terhadap fenomena korupsi yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan bangsa. Dalam perspektif iman Kristen, korupsi bukan sekadar penyimpangan hukum, melainkan krisis spiritual yang mencerminkan rusaknya relasi manusia dengan

Allah dan sesamanya. Oleh karena itu, solusi terhadap korupsi tidak dapat dibatasi pada reformasi sistem politik atau hukum semata, melainkan harus melibatkan pembaruan hati dan karakter pemimpin. Teologi Alkitabiah menegaskan bahwa kepemimpinan yang sejati berakar pada ketaatan kepada Allah dan diwujudkan melalui integritas serta tanggung jawab moral yang nyata di hadapan-Nya. Hal yang dimaksud dengan “respons teologis” dalam bagian ini adalah penilaian normatif berbasis Kitab Suci terhadap akar moral-spiritual korupsi, sekaligus arahan pembentukan karakter dan tata kelola kepemimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan sesama (Osmer 2008). Dalam konteks Indonesia yang plural di mana Kekristenan merupakan minoritas, kontribusi ini dipahami sebagai kesaksian etis dan dialog publik lintas iman untuk memperkuat integritas bersama, bukan sebagai klaim dominasi politik.

Kisah anak-anak Imam Eli (1 Samuel 2:12–36) merupakan cermin klasik dari kepemimpinan rohani yang kehilangan dua nilai fundamental tersebut. Dalam teks tersebut, Hofni dan Pinehas digambarkan sebagai imam yang tidak mengenal Tuhan (*lō' yād'û 'et YHWH*), meskipun mereka berfungsi dalam jabatan keagamaan. Mereka memperlakukan persembahan umat secara tidak hormat dan menggunakan posisi keagamaan untuk memperkaya diri (ay. 12–17). Dalam kacamata biblika, tindakan itu bukan hanya penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga bentuk “korupsi rohani” pengkhianatan terhadap kesucian pelayanan dan penyalahgunaan kepercayaan publik. Penggunaan istilah *bēnē beliyya'al* (“anak-anak durhaka”) mengindikasikan kondisi spiritual yang total rusak, di mana pelayanan keagamaan telah terlepas dari relasi dengan Allah (Tsumura 2007, 160). Ungkapan “dalam kacamata biblika” merujuk pada pembacaan historis-teologis yang menilai tindakan dalam terang kekudusan Allah dan mandat pelayanan, sehingga istilah “korupsi rohani” dipahami sebagai pengkhianatan terhadap panggilan ilahi, bukan sekadar metafora moral.

Dalam narasi tersebut, tanggapan Allah terhadap dosa anak-anak Eli memperlihatkan prinsip teologis yang tetap relevan: Allah menuntut akuntabilitas moral dari setiap pemimpin yang memegang mandat pelayanan. Ketika Eli gagal menegakkan disiplin terhadap anak-anaknya, Allah menyatakan penghukuman bahwa jabatan imam tidak lagi akan berada dalam keluarganya (ay. 27–36). Perikop ini menegaskan bahwa integritas dan akuntabilitas bukanlah nilai tambahan dalam kepemimpinan rohani, tetapi merupakan syarat keberlanjutan panggilan ilahi. (Brueggemann 2012, 45) menafsirkan teks ini sebagai “pergeseran otoritas keimamatan dari privilese turun-temurun menuju panggilan moral yang bersifat perjanjian.” Artinya, dalam pandangan Allah, jabatan kepemimpinan tidak dijaga oleh tradisi atau status, tetapi oleh kesetiaan terhadap kebenaran.

Dalam konteks Indonesia yang masih bergulat dengan kasus-kasus korupsi di berbagai sektor, kisah ini mengajarkan bahwa krisis kepemimpinan sesungguhnya adalah krisis spiritualitas. Kepemimpinan rohani sejati, tidak dapat dipisahkan dari spiritualitas profetis yang berani menentang ketidakadilan dan menegakkan kebenaran (Kretzschmar 2023, 3–5). Pemimpin yang memiliki integritas rohani sadar bahwa kekuasaan adalah

mandat, bukan milik pribadi. Ia memimpin dengan rasa takut akan Tuhan, bukan karena tekanan sosial. Prinsip ini sejajar dengan nilai *servant leadership* dalam Perjanjian Baru, sebagaimana diteladankan oleh Kristus (Mat. 20:26–28): “Barangsiapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu.” Kepemimpinan yang berakar pada pelayanan menolak orientasi kekuasaan, menempatkan tanggung jawab dan kejujuran sebagai fondasi moral.

Integrasi antara kepemimpinan rohani dan akuntabilitas moral juga memiliki dimensi sosial-eklesiologis. Akuntabilitas dalam Alkitab bukan hanya kepada Allah secara vertikal, tetapi juga kepada komunitas iman secara horizontal. Rasul Petrus menegaskan, “Gembalakanlah kawanan domba Allah... bukan karena keuntungan yang hina, tetapi dengan pengabdian diri” (1 Ptr. 5:2). Ayat ini relevan dengan isu korupsi karena secara eksplisit menolak motivasi “keuntungan yang hina” dan menuntut kepemimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan komunitas (bdk. 1 Ptr. 5:2–3). Dengan demikian, gereja dan lembaga keagamaan harus menjadi ruang praksis bagi nilai-nilai transparansi, integritas, dan pertanggungjawaban. Ketika gereja mempraktikkan akuntabilitas dalam kepemimpinan dan pengelolaan keuangannya, ia sedang memberi kesaksian publik tentang karakter Allah yang adil dan jujur.

Lembaga keagamaan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pembentukan kesadaran etis masyarakat melalui fungsi pendidikan moral dan keteladanan sosial. Gereja, sebagai salah satu institusi keagamaan yang berakar pada nilai-nilai iman Kristen, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan yang berintegritas dan berakuntabilitas sebagai manifestasi dari iman yang autentik. Gereja yang konsisten menampilkan integritas tidak hanya menjadi entitas yang menolak praktik korupsi secara moral, tetapi juga berperan sebagai agen transformasi sosial yang berkontribusi terhadap rekonstruksi nilai-nilai publik dan pembaruan budaya masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab teologis gereja tidak semata-mata terletak pada pengajaran doktrin iman, melainkan juga pada upaya internalisasi spiritualitas kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai bagian integral dari praksis iman dan bentuk ibadah yang memuliakan Allah (Kolose 3:23). Implementasi internalisasi nilai-nilai tersebut dapat diperkuat melalui kebijakan tata kelola gereja yang jelas (misalnya pemisahan fungsi otorisasi dan pengawasan), pelaporan keuangan periodik kepada jemaat, serta pembentukan tim akuntabilitas atau dewan etik yang independen di tingkat lokal maupun sinode (Clawson, J. G., & Emmons 2021).

Selain melalui gereja, pendidikan teologi dan pendidikan agama Kristen memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan kepemimpinan rohani dengan akuntabilitas moral. Kurikulum teologi yang kontekstual perlu menekankan studi biblikal mengenai dinamika keberhasilan dan kegagalan para pemimpin dalam Alkitab. Kisah Eli dan Samuel, Saul dan Daud, maupun Nehemia dan Daniel dapat dijadikan dasar pembelajaran karakter rohani yang menegaskan keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab. Melalui pendekatan demikian, pendidikan teologi dan pendidikan Kristen tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan teologis, tetapi juga sebagai proses formasi karakter yang membentuk integritas, spiritualitas, dan kesadaran etis. Sebagaimana dikemukakan

oleh (Banks and Ledbetter 2004), pendidikan teologi sejatinya bertujuan membentuk pemimpin yang mampu mengintegrasikan iman dan praktik kehidupan secara bertanggung jawab, sehingga teologi tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi diwujudkan dalam tindakan etis yang nyata. Secara pedagogis, integrasi ini dapat dilakukan melalui pembelajaran berbasis kasus (*case-based learning*), refleksi teologis atas pengalaman pelayanan, praktik magang/pelayanan sosial yang disertai supervisi, serta evaluasi karakter yang berkelanjutan sehingga formasi tidak berhenti pada ranah kognitif (Lase and Parinussa 2025; Osmer 2008).

Solusi teologis atas korupsi tidak berdiri di luar sistem sosial, tetapi bekerja dari dalam diri melalui transformasi spiritual. Spiritualitas yang berakar pada ketaatan kepada Allah melahirkan karakter yang jujur, rendah hati, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini harus diinternalisasi dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa, termasuk dalam pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan gereja. Korupsi akan terus hidup selama manusia memandang kekuasaan sebagai hak, bukan amanah; tetapi ketika kekuasaan dipahami sebagai pelayanan di hadapan Allah, maka setiap bentuk penyalahgunaan menjadi mustahil bagi hati yang takut akan Tuhan.

Oleh karena itu, integrasi kepemimpinan rohani dan akuntabilitas moral adalah fondasi teologis bagi pembaruan sosial. Pemimpin yang berintegritas tidak hanya menjaga reputasi diri, tetapi memelihara kesucian panggilannya di hadapan Allah. Ketika gereja, lembaga pendidikan, dan masyarakat Kristen secara bersama-sama membangun budaya pertanggungjawaban dan hidup dalam keteladanan Kristus, maka bangsa akan mengalami transformasi moral yang sejati. Seperti yang dinyatakan dalam Amsal 29:4, “Dengan keadilan raja menegakkan negeri, tetapi yang suka menerima suap meruntuhkannya.” Kepemimpinan rohani yang berintegritas dan akuntabel adalah bentuk nyata dari keadilan Allah yang bekerja dalam sejarah manusia dan hanya melalui jalan inilah korupsi dapat dikalahkan bukan dengan ketakutan, melainkan dengan perubahan hati yang takut akan Tuhan.

### ***Refleksi Teologis dan Implikasi Praktis***

Kepemimpinan rohani sejati tidak dapat dipisahkan dari akuntabilitas moral. Keduanya merupakan dua dimensi yang saling meneguhkan sebagai ekspresi iman yang hidup. Dalam pandangan teologi Alkitab, iman yang sejati selalu diwujudkan dalam tindakan yang benar dan bertanggung jawab. Rasul Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati (Yak. 2:17). Kepemimpinan rohani yang autentik hanya dapat bertumbuh dari spiritualitas yang mempraktikkan kejujuran, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadap kebenaran Allah. Pemimpin yang tidak hidup dalam akuntabilitas kehilangan makna rohaninya, sebab ia memisahkan panggilan ilahi dari moralitas praktis.

Korupsi dalam masyarakat modern tidak dapat diselesaikan hanya melalui reformasi sistem politik, birokrasi, atau hukum. Akar persoalannya adalah krisis spiritual yang menuntut transformasi batin pemimpin. Dalam kerangka teologi Kristen, perubahan struktural tanpa pertobatan pribadi hanya menghasilkan moralitas semu. Allah

menghendaki pembaruan hati yang melahirkan integritas sejati. Prinsip ini tampak dalam seruan para nabi seperti Mikha (6:8) dan Amos (5:24), yang menegaskan bahwa keadilan sosial harus mengalir dari kesetiaan kepada Tuhan. Dengan demikian, solusi terhadap korupsi bersifat teologis: pembaruan moral masyarakat harus dimulai dari pembaruan spiritual para pemimpin.

Refleksi pastoral dari hasil penelitian ini menekankan perlunya model kepemimpinan yang berpusat pada Kristus (*Christ-centered leadership*). Yesus menunjukkan bahwa otoritas sejati terletak pada pelayanan, bukan pada kekuasaan (Mat. 20:26–28). Gereja, lembaga teologi, dan organisasi Kristen dipanggil untuk menumbuhkan model kepemimpinan yang mengutamakan keteladanan moral dan tanggung jawab publik. Pembinaan karakter, pembiasaan disiplin rohani, dan praktik refleksi etis perlu dijadikan bagian dari formasi rohani pemimpin. Implikasi praktisnya, gereja dan lembaga pendidikan Kristen harus berperan aktif dalam membangun budaya akuntabilitas. Pendidikan karakter Kristen perlu diarahkan tidak hanya pada penguasaan pengetahuan teologis, tetapi juga pada internalisasi nilai-nilai etis sejak dini. Kurikulum pendidikan agama Kristen harus menanamkan kesadaran bahwa iman yang benar melahirkan perilaku yang jujur, bertanggung jawab, dan adil.

Dengan demikian, refleksi teologis ini menegaskan kembali bahwa kepemimpinan rohani yang berintegritas adalah panggilan iman, bukan sekadar etika sosial. Ketika akuntabilitas moral dipahami sebagai wujud ketaatan kepada Allah, maka pelayanan gereja dan kepemimpinan publik akan menjadi saksi nyata dari kasih dan kebenaran Kristus. Transformasi spiritual para pemimpin menjadi titik awal bagi lahirnya budaya bangsa yang bebas dari korupsi dan berakar pada nilai-nilai kerajaan Allah.

Implikasi praktis dari refleksi teologis ini memiliki relevansi langsung bagi gereja dalam membangun budaya kepemimpinan yang transparan, etis, dan bertanggung jawab. Gereja perlu membentuk Dewan Penasihat Etis di tingkat sinode maupun gereja lokal sebagai struktur pengawasan moral terhadap pemimpin dan pelaksanaan pelayanan. Selain itu, penerapan sistem audit keuangan yang transparan dan pelaporan berkala kepada jemaat menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan menunjukkan kesetiaan gereja dalam mempraktikkan nilai kejujuran. Dengan mengimplementasikan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, gereja tidak hanya menjadi suara moral di masyarakat, tetapi juga teladan nyata dalam memerangi korupsi.

Dalam ranah pendidikan teologi, implikasi penelitian ini menuntut integrasi nilai akuntabilitas moral ke dalam kurikulum dan proses formasi rohani. Program studi teologi seyogianya memasukkan mata kuliah wajib mengenai Etika Kepemimpinan dan Akuntabilitas, serta mengembangkan modul pembinaan karakter berbasis studi kasus, terutama terkait persoalan penyalahgunaan kuasa dan praktik korupsi dalam lembaga keagamaan maupun publik. Dengan pendekatan ini, pendidikan teologi tidak hanya menghasilkan lulusan yang cakap dalam pengetahuan doktrinal, tetapi juga memiliki kepekaan moral, kedewasaan spiritual, dan kapasitas untuk menjadi pemimpin yang berintegritas.

Adapun bagi penelitian selanjutnya, kajian ini membuka peluang untuk mengembangkan studi empiris yang menilai penerapan model kepemimpinan rohani yang akuntabel dalam konteks gereja dan lembaga pelayanan Kristen. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan melalui pendekatan komparatif dengan nilai kepemimpinan dan akuntabilitas dalam tradisi agama lain guna memperkaya dialog etik antar agama dan memperluas kontribusi teologi Kristen dalam ruang publik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan dasar teoretis, tetapi juga membuka arah pengembangan pemikiran dan aksi praktis bagi pembaruan moral dan sosial secara berkelanjutan.

## **Kesimpulan**

Kajian ini menegaskan bahwa krisis korupsi yang melanda masyarakat Indonesia berakar pada persoalan spiritual yang lebih dalam daripada sekadar kelemahan sistem. Korupsi merupakan wujud nyata dari penyimpangan moral dan hilangnya kesadaran akan tanggung jawab di hadapan Allah. Karena itu, solusi teologis terhadap korupsi tidak dapat dilepaskan dari pembaruan rohani yang melahirkan integritas dan akuntabilitas dalam kepemimpinan. Dalam terang Alkitab, kepemimpinan rohani sejati menuntut kesetiaan pada kebenaran Allah dan kesadaran bahwa kekuasaan adalah mandat ilahi untuk melayani, bukan sarana untuk memperkaya diri.

Dari hasil analisis biblika terhadap kisah anak-anak Imam Eli (1 Sam. 2:12–36), terlihat bahwa korupsi muncul ketika tanggung jawab rohani terpisah dari akuntabilitas moral. Allah menolak kepemimpinan yang kehilangan integritas, dan sebaliknya menegakkan pemimpin yang takut akan Dia. Prinsip ini menunjukkan bahwa akuntabilitas adalah aspek esensial dari iman yang hidup, bukan tambahan administratif. Pemimpin yang bertanggung jawab kepada Allah dan sesamanya mencerminkan karakter Kristus yang melayani dengan kasih dan keadilan.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa integrasi kepemimpinan rohani dan akuntabilitas moral bukan sekadar ideal etis, melainkan solusi teologis yang konkret bagi pembaruan sosial. Gereja, lembaga pendidikan teologi, dan organisasi Kristen perlu menjadi pusat formasi etis dan spiritual yang menanamkan kesadaran tanggung jawab sejak dini. Pendidikan agama Kristen yang kontekstual harus menumbuhkan pemimpin yang memiliki karakter profetis berani menegakkan kebenaran dan menolak penyimpangan. Nilai-nilai pelayanan, kejujuran, dan keteladanan moral perlu menjadi fondasi semua bentuk kepemimpinan.

Akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa pembaruan bangsa tidak dapat dilepaskan dari pembaruan spiritual para pemimpinnya. Kepemimpinan rohani yang berakar pada akuntabilitas moral adalah perwujudan nyata dari iman yang bekerja melalui kasih (Gal. 5:6). Ketika pemimpin Kristen hidup dalam ketaatan dan integritas, ia menjadi saluran kasih karunia Allah yang mentransformasi kehidupan bersama. Korupsi hanya dapat dikalahkan bukan dengan ketakutan, melainkan dengan perubahan hati yang takut akan Tuhan. Inilah panggilan gereja dan pendidikan Kristen: membentuk pemimpin yang memimpin dengan hati yang bersih, tangan yang jujur, dan hidup yang melayani Allah

dengan setia.

### Daftar Rujukan

- Adejuwon, Ezekiel Adekunle. 2023. "Christian Ethical Expectations in Leadership." *International Journal of Culture and Religious Studies* 4: 39–51. <https://orcid.org/0000-0002-2381-2293>.
- Arifianto, Yonatan Alex, Elisa Nimbo Sumual, and Yohana Fajar Rahayu. 2025. "Pendidikan Kristen Dan Moralitas Di Dunia Digital." *MANTHANO: Jurnal Pendidikan Kristen* 4(1): 20–31. doi:10.55967/manthano.v4i1.83.
- Asamoah-Gyadu, J. K. 2022. "Integrity and Accountability in African Pentecostal Leadership." *Journal of Pentecostal Theology* 31(2): 105–119.
- Banks, Robert J, and Bernice M Ledbetter. 2004. *Reviewing Leadership (Engaging Culture): A Christian Evaluation of Current Approaches*. Baker Academic.
- Blackaby, Henry T, and Richard Blackaby. 2011. *Spiritual Leadership: Moving People on to God's Agenda*. B&H Publishing Group.
- Bonhoeffer, Dietrich. 2012. *Ethics*. Simon and Schuster.
- Brueggemann, Walter. 2012. *First and Second Samuel*. Westminster John Knox Press.
- Clawson, J. G., & Emmons, J. E. 2021. "The Power of Accountability in Faith-Based Leadership: Lessons from Organizational Ethics." *Journal of Biblical Perspectives in Leadership* 11(1): 75–90.
- Creswell, John W, and J David Creswell. 2017. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage publications.
- Danandjaja, James. 2014. 0 Antropologi Indonesia *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. doi:10.7454/ai.v0i52.3318.
- Djajadi, Soewieto. 2023. "Mereduksi Perilaku Dan Budaya Koruptif: Upaya Pembentukan Karakter Anti Korupsi Dalam Perspektif Etis Teologi." *Manna Rafflesia* 10(1): 194–205.
- Elia, Natanael Budiman. 2023. "Mengkonstruksi Etika Kristiani Tentang Korupsi Dan Sikap Anti-Korupsi Melalui Lensa Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru." *Jurnal Abdiel: Khazanah Pemikiran Teologi, Pendidikan Agama Kristen Dan Musik Gereja* 7(2): 104–18.
- Erickson, Millard J. 2018. *Teologi Kristen Volume 3*. Malang: Gandum Mas.
- Evans, C Stephen. 2021. "Accountability and the Fear of the Lord." *Studies in Christian Ethics* 34(3): 316–23.
- Fry, Louis W, and Melanie P Cohen. 2009. "Spiritual Leadership as a Paradigm for Organizational Transformation and Recovery from Extended Work Hours Cultures." *Journal of business ethics* 84(Suppl 2): 265–78.
- Gule, Yosefo. 2022. "A Theological-Ethical Study of Church Against Corruption." *Indonesian Journal of Multidisciplinary Science* 2(2): 1910–20.
- Infopublik. 2024. "KPK Tangani 2.730 Perkara Korupsi Pada 2020–2024, Fokus Lima Sektor Utama." *Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia*.

- <https://infopublik.id/kategori/nasional-politik-hukum/895488/kpk-tangani-2-730-perkara-korupsi-pada-2020-2024-fokus-lima-sektor-utama?utm>.
- International, Transparency. 2024. "Corruption Perceptions Index 2024: Indonesia." *Transparency International the Global Coalition Against Corruption*. <https://www.transparency.org/en/countries/indonesia>.
- Kia, A Dan, M Th, Gilbert Timothy Majesty, and M Th. 2025. *Buku Konstruksi Pendidikan Agama Kristen Di Era Disrupsi*. Penerbit Widina.
- Kretzschmar, Louise. 2023. "A Christian Ethical Analysis of the Importance of Prophetic Leadership for Sustainable Leadership." *Verbum et Ecclesia* 44(1): 2685.
- Lase, Onesiporus Pengharapan. 2025. "Experiential Learning: Dari Pengetahuan Kognitif Menuju Iman Konkret Dalam Pendidikan Agama Kristen." *DOREA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3(2): 116–29.
- Lase, Onesiporus Pengharapan, and Stevanus Parinussa. 2025. "Restoring Self-Image in the Light of Imago Dei for Addictive Substance Abusers in the Contemporary Era." *Proskuneo: Journal of Theology* 2(1): 25–39. doi:<https://doi.org/10.53674/pjt.v2i1.256>.
- Maulidi, Ach, Muhammad Wisnu Girindratama, Bonnie Soeherman, and Fidelis Arastyo Andono. 2024. "Organizational Culture, Power Distance and Corruption: The Mediating Role of Religiosity." *The Indonesian Accounting Review* 14(2): 203–21.
- Maxwell, John C. 2018. *Developing the Leader within You 2.0*. HarperCollins Leadership.
- Mzondi, Abraham Modisa Mkhondo. 2023. "Looking Back: Theological Reflections on the Intersection between Pentecostalism and Ubuntu within the African Section of the Apostolic Faith Mission of South Africa." *Religions* 14(10): 1274.
- Nggebu, Sostenis. 2021. "Korupsi Dalam Sorotan Etika Kristen Dan Implikasinya Bagi Pendidikan Anti Korupsi." *Didache: Journal of Christian Education* 2(1): 20.
- Niebuhr, Reinhold. 2013. *Moral Man and Immoral Society: A Study in Ethics and Politics*. Westminster John Knox Press.
- Nouwen, Henri J M. 1999. *In the Name of Jesus: Reflections on Christian Leadership*. St Pauls BYB.
- Osmer, Richard R. 2008. *Practical Theology: An Introduction*. Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Ricoeur, Paul. 1976. *Interpretation Theory: Discourse and the Surplus of Meaning*. TCU press.
- Rini, Wahyu Astjarjo, Yonatan Alex Arifianto, and Carolina Etnasari Anjaya. 2024. "Membangun Pemimpin Kristen Berintegritas: Menerapkan Nilai Dan Moralitas Alkitab Untuk Menghindari Banalitas Dalam Kepemimpinan." *EDULEAD: Journal of Christian Education and Leadership* 5(1): 73–82.
- Rope, Thian, Stefanus Sujatmoko, and Juan Carlos. 2023. "Relevance Of Christian Ethics In Addressing Corruption And Social Justice Issues In Indonesia." *International Journal of Education and Literature* 2(2): 1–13.

- Roshady, Mohammad Ezha Fachriza, and Satrio Adjie Wibowo. 2024. "Exploring the Role of Religious Leaders and Religious Organizations in Combating Corruption in Indonesia." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 18(2): 447–70.
- Tsumura, David Toshio. 2007. *The First Book of Samuel*. Wm. B. Eerdmans Publishing.
- Vivian, Elvan, Andreas Eko Nugroho, and Kornelius Rulli Jonathans. 2024. "Pemikiran Teologis Galatia 5: 16 Dalam Perspektif Spiritual Leadership Sebagai Solusi Pencegahan Kejatuhan Moral Pemimpin Rohani." *Jurnal Teologi Cultivation* 8(2): 407–26.
- Watch, Indonesia Corruption. 2024. "Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024." *Indonesia Corruption Watch (ICW)*. [https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2024.pdf?utm](https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan_Hasil_Pemantauan_Tren_Korupsi_Tahun_2024.pdf?utm).
- Wright, Christopher J H. 2004. *Old Testament Ethics for the People of God*. InterVarsity Press.